Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE), 2025, Vol. 05 No. 01, Hal 76 - 91
No. ISSN 2797-0760

Analisis Peran Akuntansi Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Fortunata Fatria*, Fitri Nurhaliza, Fitri Sagita Fadli
Universitas Negeri Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jalan Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia
fortunata.fatria.2304226@students.um.ac.id

Abstrak
Korupsi merupakan penyimpangan di sektor pemerintahan yang merugikan negara dan memerlukan penanganan komprehensif. Dengan menggunakan metode studi literatur (SLR) Penelitian ini bertujuan mengkaji peran sistem akuntansi pemerintahan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui studi literatur. Hasil menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual, e-budgeting, dan penguatan audit internal berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun, efektivitasnya masih dihambat oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan SDM, budaya birokrasi, dan intervensi politik. Solusi yang direkomendasikan meliputi digitalisasi laporan keuangan, penguatan sistem pengawasan, akuntansi forensik, serta penerapan teknologi antikorupsi. Penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi pemerintah bukan hanya alat pencatatan, tetapi instrumen strategis dalam membangun tata kelola keuangan negara yang bersih dan terpercaya. Namun, tantangan seperti lemahnya pengawasan, kekurangan tenaga profesional, dan budaya birokrasi masih menghambat efektivitasnya. Digitalisasi laporan keuangan dan teknologi anti korupsi direkomendasikan untuk memperkuat integritas pengelolaan keuangan negara.
Kata Kunci:Akuntansi Pemerintah, Korupsi, Indonesia

Abstract
Corruption is a deviation in the government sector that is detrimental to the state and requires comprehensive handling. Using the literature review (SLR) method, this study aims to examine the role of the government accounting system in preventing and eradicating corruption through a literature review. The results show that the implementation of accrual-based accounting, e-budgeting, and strengthening internal audits contribute to increasing transparency and accountability. contribute to increasing transparency and accountability in state financial management. However, their effectiveness is still hampered by weak oversight, limited human resources, bureaucratic culture, and political intervention. Recommended solutions include digitizing financial reports, strengthening the oversight system, forensic accounting, and implementing anti-corruption technology. This study confirms that government accounting is not just a recording tool, but a strategic instrument in building clean and reliable state financial governance. However, challenges such as weak oversight, a shortage of professional staff, and a bureaucratic culture still hamper its effectiveness. The digitalization of financial reports and the implementation of anti-corruption technology are recommended to strengthen the integrity of state economic management.
***Keywords*: *Government Accounting*, *Corruption*, Indonesia**

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar bagi perkembangan ekonomi, stabilitas, politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. pemberantasan korupsi menjadi masalah utama dalam tata kelola pemerintahan dan kerja sama Internasional, organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Transparency International yang berperan sebagai kolektif melawan korupsi lintas negara. Konvensi ini adalah

instrumen internasional yang paling komprehensif untuk memerangi korupsi. Disahkan pada tahun 2003, UNCAC mengatur kerangka kerja hukum dan kebijakan internasional untuk mencegah, mendeteksi, dan menghukum tindak pidana korupsi. Konvensi ini telah diratifikasi oleh lebih dari 180 negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan definisi *occupational fraud* yang dirumuskan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), terdapat tiga jenis utama penipuan di lingkungan kerja, yakni korupsi, penggelapan atau penyalahgunaan aset, dan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Di antara ketiganya, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih yang telah ada sejak lama dalam sejarah manusia (Rinaldi, 2022). Dalam beberapa dekade terakhir, korupsi telah berkembang menjadi persoalan sosial yang sangat serius di Indonesia, dan telah menyusup ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kompleksitas yang menyelimuti latar belakang terjadinya korupsi di negara ini menjadikan analisis terhadap akar permasalahannya sebagai langkah penting guna merumuskan strategi penanggulangan yang lebih tepat dan efektif (Chaniago & Syailendra Putra, 2023). Korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum dengan tujuan memberikan keuntungan pribadi maupun kepada orang lain. Karena bersifat melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana, korupsi diklasifikasikan sebagai suatu bentuk kejahatan (Rustendi, 2018).

Penanggulangan korupsi membutuhkan strategi yang menyeluruh, salah satunya dengan memperkuat peran akuntansi dalam pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan transparansi serta akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat membantu dalam identifikasi dan pencegahan tindak kecurangan. Salah satu bentuk reformasi di lingkup keuangan negara adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, yang dirancang guna meningkatkan kualitas tata kelola serta pengendalian keuangan di sektor publik, penggunaan SAP juga dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi potensi tindak korupsi karena pada SAP memungkinkan pencatatan laporan keuangan dan transaksi dicatat secara *real time,* otomatis, dan terinegrassi antar departemen dan hal ini juga berupaya mengurangi celah manipulasi data karena setiap pencatatan terekam dalam sistem (audit trail). Dengan basis akrual, laporan keuangan pemerintah tidak hanya menggambarkan aliran kas, tetapi juga mencakup informasi menyeluruh tentang aset, kewajiban, serta posisi ekuitas pemerintah. Pendekatan ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan yang lebih transparan dan mempermudah pelaksanaan audit oleh lembaga seperti BPK dan BPKP (Fajar Pradnyana & Parsa, 2021). Dalam konteks transparansi, akuntansi pemerintahan berfungsi sebagai sarana penyedia informasi keuangan yang akurat, terkini, dan dapat diuji kebenarannya oleh masyarakat serta pihak berwenang. Laporan keuangan yang disusun secara menyeluruh membantu dalam mengidentifikasi lebih awal adanya penyimpangan anggaran, penyalahgunaan transaksi, maupun indikasi gratifikasi. Di sisi lain, sebagai wujud akuntabilitas, sistem ini mendukung proses pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas keuangan negara kepada publik dan badan legislatif (Umar, 2011).

Pada sektor pemerintahan, korupsi kerap terjadi akibat lemahnya sistem kontrol internal, kurangnya keterbukaan informasi keuangan, serta rendahnya tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Untuk itu, peran akuntan di lingkungan sektor publik menjadi krusial dalam membentuk sistem keuangan yang akuntabel, transparan, dan terbebas dari praktik kecurangan. Tugas akuntan sektor publik tidak sebatas menyusun laporan keuangan semata, melainkan juga mencakup keterlibatan dalam audit internal, penilaian kinerja, hingga perencanaan keuangan. Mereka memiliki tanggung jawab dalam merancang serta menjaga

mekanisme pengawasan internal yang handal guna mengidentifikasi dan mencegah terjadinya penyimpangan. Berbekal kemampuan analisis data yang kuat serta pemahaman terhadap peraturan keuangan negara, akuntan mampu mendeteksi potensi kecurangan sejak awal dan menyarankan langkah-langkah perbaikan yang relevan demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan public (Fitrianti & Su'un, 2018). Di samping itu, keberadaan auditor internal dalam lingkup sektor publik memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Auditor internal bertindak sebagai rekan strategis bagi manajemen dalam menjamin efektivitas sistem pengendalian internal serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penguatan struktur kelembagaan audit internal serta pergeseran peran auditor dalam aspek pencegahan, identifikasi, dan penyelidikan kecurangan terutama korupsi dilakukan seiring dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme auditor itu sendiri.Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik akuntansi pemerintahan, melalui kontribusi akuntan sektor publik, dapat mendukung upaya anti korupsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada pengidentifikasian hambatan serta perumusan strategi yang dapat diterapkan guna memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh.

KAJIAN PUSTAKA

1. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan merupakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh entitas publik untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan. Fokus utamanya adalah pada akuntabilitas publik dan efisiensi penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi anggaran, serta pelaporan aset dan kewajiban negara. Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik khusus, seperti dipengaruhi kebijakan politik, bersumber dari pajak masyarakat, dan ditujukan untuk kepentingan publik (Mardiasmo, 2018).

Prinsip transparansi dalam akuntansi pemerintahan memungkinkan akses informasi keuangan secara terbuka, sehingga mendukung pengawasan, audit, dan pencegahan korupsi. Transparansi tidak hanya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, tetapi juga menjadi mekanisme penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi. Oleh karena itu, sistem akuntansi pemerintahan yang baik berperan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, di mana hal ini ditandai dengan integritas, efisiensi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara (Mardiasmo, 2018).

2. Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan langkah strategis dalam reformasi pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia, dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang menggantikan sistem berbasis kas menjadi berbasis akrual. SAP menjadi pedoman baku penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas dan konsistensi informasi keuangan antar instansi dan periode. Sistem akrual memungkinkan pencatatan seluruh hak dan kewajiban, baik yang telah maupun belum direalisasikan, sehingga menghasilkan laporan yang lebih komprehensif dan realistis. Hal ini mendukung proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta mempermudah pengawasan publik dan pencegahan korupsi (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Penerapan SAP juga menciptakan keseragaman format dan metode pelaporan keuangan antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang sebelumnya cenderung tidak seragam.

Hal ini meningkatkan *comparability* antar entitas serta mendukung integrasi laporan keuangan. Oleh karena itu, reformasi sistem pelaporan ini tidak hanya berdampak teknik, tetapi juga mendukung perumusan kebijakan fiskal nasional yang berbasis data aktual, sehingga dapat dikatakan bahwa SAP menjadi instrumen penting dalam membangun sistem keuangan pemerintah yang kredibel, akuntabel dan modern (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

3. Korupsi di Sektor Pemerintahan

Korupsi merupakan masalah kronis yang merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan menguras sumber daya negara, dengan bentuk seperti penyuapan, penggelapan, dan manipulasi anggaran. Menurut laporan *Transparency International* (2023), skor Indeks Persepsi Korupsi yang masih rendah (34/100) mencerminkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dan komunitas internasional terhadap integritas sektor publik di Indonesia. Temuan lain juga menunjukkan bahwa korupsi masih mengakar dalam birokrasi, terutama karena lemahnya sistem pengawasan internal dan rendahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara (Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

Sistem akuntansi pemerintahan, khususnya penerapan SAP berbasis akrual, berperan strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan mencatat seluruh transaksi, aset, dan kewajiban secara menyeluruh (Umar, 2011). Maka, peluang korupsi dapat diminimalkan, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih objektif. Oleh karena itu, akuntansi yang baik, ditunjang oleh audit dan pengawasan internal yang berkualitas, menjadi elemen penting dalam strategi pemberantasan korupsi (Tiwana, 2022).

4. Teori Sinyal

Teori sinyal yang dikembangkan oleh Spence (1973) menyatakan bahwa dalam situasi asimetri informasi, pihak yang memiliki informasi lebih (pengirim sinyal) dapat mengirimkan sinyal kepada pihak yang memiliki informasi lebih sedikit (penerima sinyal) guna memengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan. Sinyal ini harus bersifat kredibel dan dapat diversifikasi, sehingga mampu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan dalam pengambilan keputusan. Teori ini menjadi kerangka penting dalam memahami bagaimana entitas membangun legitimasi melalui penyampaian informasi yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan informasi.

Sementara itu, pemerintah berperan sebagai pengirim sinyal melalui penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang disusun sesuai SAP menjadi sinyal positif yang menunjukkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik. Informasi ini penting bagi masyarakat, legislatif, serta lembaga pengawas dalam menilai kinerja dan integritas pemerintah. Sebaliknya, pelanggaran terhadap standar pelaporan dapat menjadi sinyal negatif yang menurunkan tingkat kepercayaan publik dan menghambat efektivitas audit serta pengawasan. Oleh karenanya, penerapan SAP bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga strategi komunikasi untuk membangun kredibilitas pemerintah di hadapan publik (Bangsawan & Abbas, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi *literature review* (SLR) guna menganalisis peran akuntansi pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Creswell (2014), *literature review* merupakan suatu rangkuman tertulis yang mencakup karya ilmiah, buku, serta tinjauan lain yang mendefinisikan konsep dan menyajikan informasi pada masa lampau dan masa kini, yang kemudian diintegrasikan

berlandaskan topik dan dokumen yang relevan. Peneliti menggunakan metode penelitian ini karena studi literatur mampu menganalisis konsep dan teori akuntansi pemerintahan, menelaah kebijakan dan regulasi yang berlaku, dan menilai peran sistem akuntansi dalam pemberantasan korupsi. Ada pun, literatur, di mana digunakan dalam penelitian ini memiliki rentang waktu publikasi 5 hingga 10 tahun yang lalu. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat menyajikan informasi yang relevan dan sesuai dengan regulasi terkini.

Selain itu, dalam pencarian literatur, peneliti menerapkan kerangka kerja PICO sebagai pendekatan dalam menyeleksi sumber yang relevan. Pendekatan PICO (*Population*/*Problem*, *Intervention*, *Comparation*, *Outcome*) sendiri berfokus pada penelitian yang menganalisis gagasan, teori, dan pengetahuan yang tersedia dalam berbagai artikel yang dijadikan sumber referensi. Di mana, pendekatan ini mengintegrasikan ringkasan, literatur, dan opini peneliti berdasarkan artikel terbaru sebagai landasan utama dalam menyajikan pemahaman yang komprehensif (Silaen & Dewayanto, 2024). Kemudian, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sampel, dengan kata kunci akuntansi pemerintah, pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi, akuntabilitas pemerintah, transparansi keuangan negara, serta audit pemerintah sebagai dasar dalam pencarian literatur yang relevan.

Tabel 1. *Framework* PICO

Kerangka PICO	**Keterangan**
Population/*Problem*	Pemerintah, lembaga audit negara (BPK, BPKP, Inspektorat), serta pemangku kepentingan dalam tata kelola keuangan negara
Intervention	Penerapan akuntansi pemerintahan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
Comparation	Tidak ada pembanding
Outcome	1. Peran Akuntansi Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia 2. Tantangan Akuntansi Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia 3. Evaluasi Peran Akuntansi Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Sumber: Analisis Artikel dan Berita

Tabel 2. Kriteria Literatur Berupa Artikel

Kriteria	**Inklusi**	**Eksklusi**
Subjek	Penelitian yang berfokus pada akuntansi pemerintahan dan pemberantasan korupsi	Selain penelitian yang berfokus pada akuntansi pemerintahan dan pemberantasan korupsi
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Tidak menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
Sumber	Artikel penelitian yang diakses melalui jurnal-jurnal akademik dan kredibel	Artikel penelitian yang diakses melalui selain jurnal akademik
Jenis Artikel	Artikel yang dipublikasikan oleh jurnal yang memiliki reputasi, telah terakreditasi, dan diakui secara akademik	Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal atau oleh penerbit yang tergolong predator serta dapat diidentifikasi melalui situs Beall's List
Jangka Waktu	2016-2025	Sebelum tahun 2016

Tema Isi Jurnal	Pada bidang akuntansi pemerintahan dan pemberantasan korupsi	Selain pada bidang akuntansi pemerintahan dan pemberantasan korupsi
Area	Penelitian meliputi peran akuntansi pemerintahan dalam transparansi keuangan, pencegahan korupsi, dan di Indonesia	Di luar penelitian dari peran akuntansi pemerintahan dalam transparansi keuangan, pencegahan korupsi, dan di Indonesia

Sumber: Analisis Artikel

Tabel 3. Kriteria Literatur Berupa Berita

Kriteria	**Inklusi**	**Eksklusi**
Subjek	Penelitian yang berfokus pada akuntansi pemerintahan dan pemberantasan korupsi	Selain penelitian yang berfokus pada akuntansi pemerintahan dan pemberantasan korupsi
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Tidak menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
Sumber	Berita yang dapat diakses melalui situs *Google*	Berita yang tidak dapat diakses melalui situs *Google*
Jenis Berita	Berita yang dipublikasikan oleh media massa bereputasi dan telah melalui proses penulisan serta tinjauan oleh tim redaksi	Berita yang dipublikasikan oleh media massa tidak bereputasi dan tidak melalui proses penulisan serta tinjauan oleh tim redaksi
Jangka Waktu	2021-2025	Sebelum tahun 2021
Tema Isi Berita	Pada bidang akuntansi pemerintah	Selain pada bidang akuntansi pemerintah
Area	Penelitian meliputi peran akuntansi pemerintahan dalam transparansi keuangan, pencegahan korupsi, dan di Indonesia	Di luar penelitian dari peran akuntansi pemerintahan dalam transparansi keuangan, pencegahan korupsi, dan di Indonesia

Sumber: Analisis Berita

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paparan ini menyajikan kajian literatur mengenai analisis peran akuntansi pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sumber-sumber yang dianalisis telah diseleksi berdasarkan kriteria yang dijelaskan pada bagian metode penelitian. Di mana, bagian ini akan berfokus pada tiga aspek utama, yaitu peran akuntansi pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, tantangan/hambatan yang dihadapi, dan evaluasi terhadap efektivitas peran akuntansi pemerintah dalam mendukung upaya tersebut.

Tabel 4. Peran Akuntansi Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Nomor	**Judul Artikel**	**Peneliti**	**Temuan**
1	*The Effect of the Implementation E-Budgeting, Audit Board Opinion and Internal Control System on Corruption in Indonesia*	(Marselina *et al,* 2024)	Tindakan korupsi masih merajalela di Indonesia, khususnya di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga legislatif, dan lembaga pendidikan. Akuntansi pemerintah memiliki kontribusi dalam pemberantasan dan pencegahan tindakan tersebut melalui *e-budgeting* dan sistem pengendalian internal yang kuat, sehingga mampu meningkatkan transparansi

			dan akuntabilitas keuangan negara. Tindakan korupsi paling sering terjadi dalam belanja modal. Dengan demikian, semakin tinggi belanja modal suatu daerah dan instansi, maka tingkat pengawasan dan pengendalian harus semakin baik. Upaya tersebut penting dilakukan karena tindakan korupsi dalam suatu negara dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, keadilan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
2	*Financial Reporting Quality and Local Government Corruption: Evidence from Indonesia*	(Rakhman & Mahmudi, 2023)	Kualitas laporan keuangan yang buruk oleh akuntansi pemerintah dapat mengakibatkan peningkatan tindakan korupsi di pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Selain itu, apabila pemerintah daerah menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang rendah, sebagaimana yang terlihat pada ketidakmampuan memberikan pernyataan atas laporan keuangan, maka walikota akan lebih berisiko melakukan tindakan korupsi. Dengan kata lain, opini audit yang buruk dapat meningkatkan kemungkinan walikota menjadi tersangka korupsi.
3	*Public Financial Management and Corruption in Indonesia: A Panel Cointegration and Causality Analysis*	(Triwibowo, 2020)	Manajemen keuangan publik yang baik, termasuk akuntansi pemerintahan yang efektif, memiliki peran dalam menekan tingkat korupsi di Indonesia. Peran tersebut dilakukan akuntansi pemerintah melalui proses transformasi perilaku dan struktur kelembagaan di sektor publik. Selain itu, pengelolaan keuangan publik yang efektif dan berkelanjutan dapat berangsur-angsur mengubah perilaku pejabat publik untuk menghindari tindakan korupsi dan penyimpangan, serta mendorong peningkatan standar, regulasi, prosedur, dan dimensi kelembagaan secara menyeluruh. Dengan demikian, akan terjadi pengurangan peluang dalam menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang demi kepentingan pribadi.
4	*New Public Management and Corruption: Empirical Evidence of Local Governments in Indonesia*	(Ratmono & Darsono, 2022)	Penelitian tersebut menemukan bahwa peningkatan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan tingkat korupsi, dan sebaliknya. Selain itu, audit keuangan yang menghasilkan opini atas laporan keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Selanjutnya, kegagalan dalam sistem pengendalian internal dan pelanggaran terhadap regulasi dapat meningkatkan tingkat

			korupsi. Di sisi lain, berdasarkan *fraud triangle theory*, desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kesempatan terjadinya korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Sementara itu, kualitas laporan keuangan dan audit dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal pada pemerintah daerah di Indonesia perlu dilakukan pengendalian melalui *New Public Management* lainnya, yaitu peningkatan kualitas laporan keuangan dan pelaksanaan audit keuangan dengan independen.
5	Berperan Mencegah Tindak Korupsi sebagai Sarjana Akuntansi	(Pristy, 2022)	Dalam sektor usaha maupun sektor publik, akuntansi berfungsi sebagai instrumen penyajian data keuangan sekaligus sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Namun, mereka juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya pemberantasan dan pencegahan tindakan korupsi di Indonesia. Pada sesi ketiga seminar mengenai "Korupsi dalam Sektor Pemerintahan", narasumber mengemukakan bahwa jenis korupsi yang paling sering terjadi di pemerintahan Indonesia adalah tindakan suap. Selain itu, tindakan korupsi dapat memberikan dampak negatif pada ketimpangan ekonomi, kesalahan distribusi sumber daya, dan rendahnya dampak kegiatan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sumber: Analisis Artikel dan Berita

Tabel 4 menyajikan hasil dari beberapa artikel penelitian dan berita mengenai peran akuntansi pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Marselina *et al*. (2024), akuntansi pemerintah memiliki peran dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi melalui penerapan *e-budgeting* dan penguatan sistem pengendalian internal, yang akan berdampak pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, tindakan korupsi paling kerap ditemukan pada pos belanja modal. Di sisi lain, Rakhman & Mahmudi (2023) mengemukakan bahwa akuntansi pemerintah berperan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan opini audit sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada pun, menurut Triwibowo (2020), efektivitas akuntansi pemerintahan memiliki dampak pada penurunan tingkat korupsi melalui proses perubahan sikap dan struktur organisasi di sektor publik. Pengelolaan keuangan negara yang berkesinambungan secara berangsur-angsur juga dapat mendorong perubahan sikap aparatur negara untuk menghindari tindakan korupsi dan penyimpangan, serta menguatnya standar, regulasi, prosedur, dan dimensi kelembagaan secara menyeluruh.

Selanjutnya, Ratmono & Darsono (2022) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui peningkatan kualitas laporan keuangan, pelaksanaan audit yang independen, dan penguatan sistem pengendalian internal

dalam menghadapi risiko korupsi akibat desentralisasi fiskal. Kemudian, Pristy (2022) menjelaskan bahwa profesi akuntan termasuk akuntan pemerintahan memiliki peran dalam pemberantasan korupsi di Indonesia melalui penyajian data keuangan yang akuntabel dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, khususnya terhadap tindakan suap di sektor pemerintahan. Secara keseluruhan, akuntansi pemerintah memiliki peran dalam pemberantasan korupsi di Indonesia melalui penerapan *e-budgeting*, peningkatan kualitas laporan keuangan dan opini audit, penguatan sistem pengendalian internal, serta mendorong perubahan perilaku dan struktur kelembagaan di sektor publik. Selain itu, tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel juga memiliki peran dalam mengatasi risiko korupsi yang tinggi, seperti tindakan penyuapan dan penyimpangan belanja modal (Marselina *et al*., 2024; Rakhman & Mahmudi, 2023; Triwibowo, 2020; Ratmono & Darsono, 2022; Pristy, 2022).

Tabel 5. Tantangan Akuntansi Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Nomor	Judul Artikel	Peneliti	Temuan
1	*Examining the unintended outcomes of NPM reforms in Indonesia*	(Harun *et al*., 2019)	Penelitian ini mengungkap bahwa Indonesia telah melakukan reformasi besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk desentralisasi kewenangan dan pembaruan sistem keuangan negara. Namun, pelaksanaannya di daerah masih menghadapi tantangan serius. Kepala daerah kerap menyalahgunakan kekuasaan, pengawasan internal belum efektif karena kurangnya kompetensi auditor, dan budaya korupsi warisan Orde Baru tetap mengakar kuat. Upaya mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel masih sering terhambat.
2	*Exploring Factors Influencing Digital Transparency in Local Governments: Practices in Indonesia*	(Octavio & Urumsah,2024)	Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di pemerintah daerah dipengaruhi oleh efektivitas sistem akuntabilitas, mutu laporan keuangan, dan kemajuan e-government. Ketiga aspek ini membentuk kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah. Daerah dengan akuntabilitas tinggi, laporan keuangan standar, dan layanan digital memadai cenderung lebih transparan dan responsif.
3	*Evaluating the Implementation of a Mandatory Dual Reporting System: The Case of Indonesian Local Government*	(Mir *et al*., 2019)	Penelitian ini membahas dampak penerapan sistem akuntansi berbasis akrual (CTA) oleh pemerintah daerah di Indonesia. Meskipun sistem ini telah diwajibkan secara nasional, penggunaannya dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan aset, penyusunan anggaran, dan evaluasi kinerja masih belum optimal. Bahkan,

			tujuan utama penerapan CTA untuk memberantas korupsi belum tercapai,
4	*The Effectiveness of Indonesia's Anti-Corruption Law on Legal Reform and Implementation*	(Tomagola *et al*., 2024)	Penelitian ini menyatakan bahwa Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberantas korupsi, seperti pembentukan KPK dan berbagai undang-undang antikorupsi. Namun, pelaksanaannya masih terhambat oleh campur tangan politik, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, keterbatasan sumber daya, serta budaya birokrasi yang resisten terhadap reformasi.
5	Audit Forensik dan Bukti Digital dalam Mengungkap Kasus Korupsi BTS Kominfo 2023	(Ali, S. & Bakhtiar, H.S., 2024)	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di era digital saat ini, peran bukti digital dan audit forensik sangat penting dalam proses pembuktian hukum, terutama dalam kasus korupsi. Bukti digital mampu merekam jejak aktivitas elektronik yang mempermudah pengungkapan fakta dan alur peristiwa, sedangkan audit forensik berfungsi untuk mengidentifikasi penyimpangan dana secara terperinci.
6	*An effective anti-fraud program: how do we know? (the challenge of finding an anti-fraud program in the indonesian public sectors)*	(Eryanto, 2020)	Penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan program anti-fraud di lembaga publik Indonesia masih menghadapi hambatan serius yang berasal dari faktor eksternal dan internal. Selain itu, dukungan politik yang lemah juga menjadi penghalang besar. Oleh karena itu, agar program anti-fraud benar-benar efektif, diperlukan keseimbangan antara pemahaman nilai budaya lokal, dan dukungan politik.
7	*Exploring the Roots and Solutions of Maladministration, Power Abuse, or Corruption in Contemporary Indonesian Villages*	(Rifai *et al*., 2024)	Penelitian ini menjelaskan mengenai demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.Demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia bertujuan meningkatkan kesejahteraan desa, namun memunculkan potensi korupsi dana publik. Solusinya adalah reformasi tata kelola desa melalui transparansi, teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sanksi hukum tegas.

Sumber: Analisis Artikel

Tabel 5 menyajikan data tentang tantangan akuntansi Indonesia dalam memberantas korupsi pada pembahasan mengenai Reformasi NPM dalam tata kelola seperti desentralisasi

dan penerapan sistem keuangan baru di daerah ternyata belum menghasilkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Yang diikuti oleh bagaimana tingkat transparansi informasi di daerah yang bergantung pada efektivitas akuntabilitas, kualitas laporan keuangan, dan kemajuan *e-government*. Ketiga aspek inilah memainkan peran penting dalam memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Octavio & Urumsah, 2024).

Pada pembahasan selanjutnya mengenai sistem CTA, sistem yang mengimplementasikan pengambilan keputusan dan pengawasan secara optimal, yang merupakan sistem wajib tingkat nasional yang belum dilaksanakan secara optimal. Tantangan dalam memberantas korupsi di Negara Indonesia bisa dikatakan kompleks. Meskipun Negara Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk memberantas korupsi, tetapi pelaksanaan hukumnya masih lemah karena adanya intervensi politik, keterbatasan kapasitas lembaga, serta lemahnya sinergi antar penegak hukum (Tomagola *et al*., 2024) karena masih adanya kepentingan pribadi.

Tantangan dalam memberantas korupsi di Indonesia harus memiliki bukti digital dan audit forensik yang akurat sehingga bisa mengungkap kasus korupsi besar, seperti skandal BTS Kominfo. Hal ini menandai pentingnya pendekatan teknologi dalam pemberantasan korupsi di era digital (Ali & Bakhtiar, 2024). Dengan diikuti program *Anti-Fraud* pada lembaga publik, dikarenakan masih banyak mengalami hambatan terutama dari pengaruh politik, lemahnya kepemimpinan etis, serta tidak adanya komitmen kuat dari pihak-pihak terkait

Tabel 6. Evaluasi Peran Akuntansi Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Nomor	Judul Artikel	Peneliti	Temuan
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	(Aprilla, W., *et al*, 2024)	Penelitian ini mengevaluasi peran teknologi digital dan partisipasi publik dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Temuan menunjukkan bahwa *e-government,* open data, sistem pengaduan digital, dan keterlibatan masyarakat efektif memperkuat pengawasan keuangan publik, sehingga mendukung sistem akuntansi pemerintahan yang lebih transparan dan berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi.
2	*Exploring Factors Influencing Digital Transparency in Local Governments: Practices in* Indonesia	(Octavio & Urumsah, 2024)	Penelitian ini menganalisis pengaruh kematangan *e-government*, kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas terhadap transparansi digital pemerintah daerah di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa kematangan *e-government* dan laporan keuangan yang baik meningkatkan transparansi informasi. Namun, keterbatasan akses situs web masih menjadi hambatan. Studi ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola digital untuk mendukung transparansi, menekan korupsi, dan meningkatkan legitimasi pemerintah daerah.
3	*Forensic Accounting as Antibiotic for*	(Rolihlahla *et al*, 2017)	Penelitian ini mengkaji peran akuntansi forensik dalam penanganan korupsi di

	Pressing Corruption Infection in Indonesia		Indonesia melalui pendekatan kualitatif interpretatif. Hasilnya menunjukkan bahwa teknik investigasi forensik yang diterapkan oleh KPK, BPKP, dan auditor internal efektif menghasilkan bukti valid, termasuk perhitungan kerugian negara dan keterangan ahli. Akuntansi forensik terbukti sebagai alat deteksi dan pencegahan korupsi yang efektif, serta relevan diterapkan di seluruh tingkat pemerintahan.
4	Peran Pengawasan Internal Dalam Upaya Pencegahan Kecurangan Akuntansi Sektor Publik	(Savira, D., *et al*, 2024)	Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan internal yang kuat merupakan strategi krusial dalam mencegah kecurangan akuntansi di sektor publik. Penguatan fungsi ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan, sekaligus mengurangi risiko korupsi. Implementasi sistem seperti whistleblower dan *e-Procurement* juga dinilai efektif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan.
5	Kontrol Pemerintah terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia	(Muttaqin, I., 2019)	Penelitian ini menunjukkan bahwa *e-procurement* efektif meningkatkan transparansi dan mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan penyedia jasa, sehingga mendukung pemberantasan korupsi. Pengawasan internal dan partisipasi publik turut memperkuat tata kelola yang bersih. Temuan menegaskan bahwa upaya anti korupsi perlu didukung oleh sistem akuntansi dan pelaporan yang transparan dan akuntabel, tidak hanya penindakan hukum.
6	*Public Financial Management and Corruption in Indonesia: A Panel Cointegration and Causality Analysis*	(Triwibowo, S., 2020)	Temuan ini mengungkap hubungan jangka panjang antara manajemen keuangan publik yang baik, meliputi transparansi anggaran, pelaporan akrual, dan efektivitas audit dengan penurunan korupsi. Reformasi keuangan publik secara kausal menurunkan praktik korupsi. Studi menegaskan pentingnya penguatan pelaporan, audit eksternal oleh BPK, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
7	Transformasi Digital dalam Pemerintahan: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas	(Sakti, A.P., 2024)	Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital memperkuat akuntabilitas publik melalui sistem informasi yang transparan dan terdokumentasi. Digitalisasi pelaporan keuangan meningkatkan efisiensi, mengurangi

			manipulasi, dan mempermudah pengawasan serta partisipasi publik. Teknologi juga mempercepat deteksi penyimpangan, menjadikan fungsi akuntansi pemerintahan lebih efektif dalam pengendalian dan pencegahan korupsi.

Sumber: Analisis Jurnal dan Artikel Relevan

Tabel 6 menyajikan data dari jurnal dan artikel relevan mengenai evaluasi peran akuntansi pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara umum, temuan tersebut menunjukkan bahwa akuntansi pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendeteksi, mencegah, dan mengurangi korupsi, khususnya melalui penerapan teknologi digital, sistem pengendalian internal, akuntansi forensik, dan penguatan pelaporan keuangan. Penelitian oleh Aprilla *et al.* (2024) dan Sakti (2024) menjelaskan bahwa digitalisasi sistem keuangan pemerintah, seperti *e-government* dan digitalisasi pelaporan, secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Sistem ini memfasilitasi akses terhadap informasi anggaran, memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta mempercepat deteksi penyimpangan keuangan. Peluang manipulasi data dan praktik korupsi dapat ditekan secara signifikan melalui adanya sistem yang terdokumentasi secara digital

Studi oleh Octavio & Urumsah (2024) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas transparansi digital, seperti kematangan *e-government*, kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas, sekaligus menyoroti tantangan aksesibilitas informasi publik. Rolihlahla et al. (2017) menekankan peran akuntansi forensik dalam mendukung penegakan hukum melalui bukti audit dan investigasi kasus korupsi. Savira et al. (2024) menggarisbawahi pentingnya pengawasan internal, termasuk sistem *whistleblower* dan *e-procurement*, sebagai strategi pencegahan korupsi. Sementara itu, Muttaqin (2019) dan Triwibowo (2020) menunjukkan bahwa pengadaan elektronik meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko suap. Korelasi positif antara kualitas pengelolaan keuangan dan penurunan korupsi diperkuat oleh audit dan reformasi pelaporan anggaran. Secara keseluruhan, akuntansi pemerintah berperan strategis dalam pemberantasan korupsi secara preventif, detektif, dan represif, terutama bila didukung inovasi teknologi dan pengawasan yang efektif.

Penelitian peran akuntansi pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan teori sinyal (*signaling theory*) yang dikembangkan oleh Michael Spence (1973). Teori ini menjelaskan bahwa pihak yang memiliki informasi (pemerintah) dapat menyampaikan sinyal kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya melalui pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sinyal tersebut ditujukan untuk menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik korupsi. Laporan keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bentuk sinyal positif. Ketika laporan tersebut dipublikasikan secara digital dan dapat diakses oleh publik, maka transparansi meningkat, asimetri informasi menurun, dan potensi korupsi dapat ditekan. Oleh karena itu, akuntansi pemerintah bukan hanya alat teknis, tetapi juga alat komunikasi strategis dalam membangun kepercayaan publik. Hal ini sesuai dengan temuan Octavio & Urumsah (2024), yang menekankan bahwa *digital transparency* di tingkat pemerintah daerah memperkuat akuntabilitas publik melalui penyampaian sinyal yang jelas dan dapat dipercaya kepada masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan kajian artikel dan berita, akuntansi pemerintah memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai instrumen transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan keuangan negara. Penerapan *e-budgeting*, penguatan pengendalian internal, peningkatan kualitas laporan keuangan, serta pembentukan budaya organisasi yang mendukung efektif mencegah korupsi, khususnya pada area rawan seperti belanja modal dan penyuapan. Namun, implementasi akuntansi pemerintah menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan internal, keterbatasan SDM, sistem akuntansi akrual yang belum optimal, serta pengaruh politik dan budaya birokrasi. Hambatan ini diperparah oleh regulasi yang lemah, kurangnya sinergi antar penegak hukum, dan rendahnya komitmen politik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dan pemanfaatan teknologi digital seperti *e-government*, digitalisasi pelaporan, audit forensik, dan sistem *whistleblower* untuk mendukung deteksi dan pencegahan korupsi. Secara keseluruhan, akuntansi pemerintah berfungsi sebagai alat preventif, detektif, dan represif dalam mendukung tata kelola keuangan yang bersih sesuai teori sinyal.

Keterbatasan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dominan deskriptif-kualitatif berbasis literatur sekunder membatasi bukti empiris mengenai hubungan kausal antara praktik akuntansi pemerintah dan tingkat korupsi. Ketiadaan data primer menurunkan validitas temuan, sementara perbedaan implementasi antara pemerintah pusat dan daerah belum dikaji secara spesifik. Tantangan teknis seperti infrastruktur digital, literasi teknologi, dan resistensi perubahan juga belum dibahas mendalam. Kurangnya integrasi teori tata kelola, antikorupsi, dan kelembagaan membuat analisis belum komprehensif. Penelitian lanjutan kuantitatif dan kontekstual diperlukan untuk memperkuat temuan.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini relevan dalam mendorong reformasi pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Temuan mendukung penguatan penerapan SAP berbasis akrual sebagai instrumen pencegahan korupsi, serta mendorong digitalisasi sistem keuangan melalui *e-budgeting, e-audit, dan e-procurement* untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi manipulasi. Studi ini juga membuka ruang pengembangan tata kelola keuangan berbasis teori keagenan dan sinyal, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan kuantitatif dan studi kasus sektoral guna menguji efektivitas akuntansi pemerintah dalam menekan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, S. & Bakhtiar H.S. (2024). Audit Forensik dan Bukti Digital dalam Mengungkap Kasus Korupsi BTS Kominfo 2023. *Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, *3*(1), 115–125. https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i1.2036

Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). *Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui teknologi digital dan partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(4), 321–334. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553

Bangsawan, A. A., & Abbas, A. (2021). Efek Pelanggaran Standar Akuntansi Pemerintahan dan Ketidakpatuhan Peraturan terhadap Opini Audit Laporan Keuangan di Sulawesi Selatan. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (2), 461-472. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1481

Chaniago, F. Z. D., & Syailendra Putra, M. R. (2023). Menggali Akar Masalah Korupsi di Indonesia: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendorong dan Solusi Pemberantasannya. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, *1*(2), 548–552. https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1428

Eryanto, D. (2020). An Effective Anti-Fraud Program: How Do We Know? (The Challenge Of Finding An Anti-Fraud Program In The Indonesian Public Sectors). *Asia Pacific Fraud Journal*, *5*(2), 288. https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i2.157

Fajar Pradnyana, I. M., & Parsa, I. W. (2021). Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *10*(2), 344. https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p11

Fitrianti, F., & Su'un, M. (2018). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, *1*(1), 01–14. https://doi.org/10.33096/paradoks.v1i1.76

Harun, H., Mir, M., Carter, D., & An, Y. (2019). Examining the unintended outcomes of NPM reforms in Indonesia. *Public Money & Management*, *39*(2), 86–94. https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1580892

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Spence, M. (1973). *Job Market Signaling*. The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355–374. https://doi.org/10.2307/1882010

Muttaqin, I. (2019). *Kontrol pemerintah terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia*. Res Judicata, 2(2), 1–12. DOI:10.29406/rj.v2i2.1749

Marselina, Puspita Yuliandari, Bayu Sujadmiko, & Niken Kusumawardani. (2024). The Effect of The Implementation E-Budgeting, Audit Board Opinion and Internal Control System on Corruption in Indonesia. *Revista de Gestão Social E Ambiental, 18*(12), e010453–e010453. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n12-154

Mir, M., Harun, H., & Sutiyono, W. (2019). Evaluating the Implementation of a Mandatory Dual Reporting System: The Case of Indonesian Local Government. *Australian Accounting Review*, *29*(1), 80–94. https://doi.org/10.1111/auar.12232

Octavio, M. F. R., & Urumsah, D. (2024). *Exploring factors influencing digital transparency in local governments: Practices in Indonesia*. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 11(2), 263–280. https://doi.org/10.24815/jdab.v11i2.39361

Rakhman, F., & Mahmudi. (2023). Financial Reporting Quality and Local Government Corruption: Evidence from Indonesia. *SSRN*. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4634690

Ratmono, D., & Darsono, D. (2022). New public management and corruption: Empirical evidence of local governments in Indonesia. *Public and Municipal Finance, 11*(1), 54–62. https://doi.org/10.21511/pmf.11(1).2022.05

Rinaldi, R. P. (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, *10*(4). https://doi.org/10.22146/abis.v10i4.7899.

Rifai, R., Kamaluddin, K., & Hidayat, R. (2024). Exploring the Roots and Solutions of Maladministration, Power Abuse, or Corruption in Contemporary Indonesian Villages. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, *32*(3), 1115–1140. https://doi.org/10.47836/pjssh.32.3.15

Rolihlahla, G. A. C., Satyawan, M. D., & Triani, N. N. A. (2017). *Forensic accounting as antibiotic for pressing corruption infection in Indonesia*. Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura, 20(2), 231–238. https://doi.org/10.14414/jebav.v20i2.1123

Rustendi, T. (2018). Peran Audit Internal Dalam Memerangi Korupsi (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi Apip). *Jurnal Akuntansi*, *12*(2), 111–126. https://doi.org/10.37058/jak.v12i2.384

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. (Diakses di: https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf)

Pristy, K. L. (2022). *Berperan Mencegah Tindak Korupsi sebagai Sarjana Akuntansi*. Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3871-berperan-mencegah-tindak-korupsi-sebagai-sarjana-akuntansi

Sakti, A. P. (2024). *Transformasi digital dalam pemerintahan: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas*. STIA Bengkulu. (Tersedia di: https://stiabengkulu.ac.id/news/transformasi-digital-dalam-pemerintahan-meningkatkan-transparansi-dan-akuntabilitas)

Savira, D., Siboro, S. F., & Shafa, S. (2024). *Peran pengawasan internal dalam upaya pencegahan kecurangan akuntansi sektor publik*. Akuntansi, 10(2).

Silaen, R. P., & Dewayanto, T. (2024). Penggunaan Berbagai *Artificial Intelligence* pada Proses Audit - *A Systematic Literature Review*. *Diponegoro Journal of Accounting, 13*(2), 1–12.

Tiwana, R. (2022). *Peran Audit Pemerintah dalam Mengendalikan Level Korupsi di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 8(1).(Diakses di: https://inspektorat.serangkab.go.id/storage/media/peran-audit-pemerintah-dalam-mengendalikan-level-korupsi-di-indonesia-rayesh-tiwana-semm_1672218078.pdf)

Triwibowo, S. (2020). Public Financial Management And Corruption In Indonesia: A Panel Cointegration And Causality Analysis. *Journal of Indonesian Economy and Business, 34*(3). https://doi.org/10.22146/jieb.50719

Tomagola, A. G., Yaurwarin, W., Rahajaan, J. A., Sahetapy, A. J., & Kalauw, R. W. (2024). The Effectiveness of Indonesia's Anti-Corruption Law on Legal Reform and Implementation. *West Science Law and Human Rights*, *2*(03), 251–258. https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i03.1129

Umar, H. (2011). Peran Akuntan Dalam Pemberantasan Korupsi. *Sosiohumaniora*, *13*(1), 108. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v13i1.5465

Universitas Muhammadiyah Malang (2023). *Akuntan dan Hubungannya dengan Tindak Korupsi*. Jurnal Post. (Diakses di: https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/jurnal-post/akuntan-dan-hubungannya-dengan-tindak-korupsi.html)